

INKLUSI KEUANGAN DAN LITERASI KEUANGAN DI DAERAH TERTINGGAL

Muhammad Alwan Habibi Mushlih¹, Donal Anry Jaya Sinurat²

^{1,2}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email: muhammad.mushlih@staf.undana.ac.id

Article History

Received: 22-06-2025

Revision: 27-06-2025

Accepted: 27-06-2025

Published: 26-06-2025

Abstract. *This study aims to examine the state of financial literacy and inclusion in two underdeveloped districts of East Nusa Tenggara Province, namely Belu and East Sumba. Using a mixed methods approach, the study combines quantitative data from 300 respondents and qualitative insights from in-depth interviews with 20 key informants. Findings reveal that although access to formal financial services has improved, financial literacy remains low, leading to limited and often improper use of financial products. A positive correlation ($r = 0.62$) was found between financial literacy and bank account ownership, highlighting the need for locally-based and participatory financial education. Key challenges include geographical distance, limited digital infrastructure, and low trust in formal financial institutions. The study recommends integrated strategies involving contextual education, infrastructure development, and multi-stakeholder collaboration to promote sustainable financial inclusion and literacy.*

Keywords: *financial literacy, financial inclusion, underdeveloped regions, financial education, digital access, East Nusa Tenggara*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi literasi dan inklusi keuangan di dua kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Belu dan Sumba Timur. Menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini menggabungkan data kuantitatif dari 300 responden dengan data kualitatif dari wawancara mendalam terhadap 20 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap layanan keuangan formal mulai tersedia, tingkat literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah, yang berdampak pada minimnya pemanfaatan layanan keuangan secara bijak. Korelasi positif ditemukan antara tingkat literasi dan kepemilikan rekening bank ($r = 0,62$), yang mengindikasikan pentingnya edukasi keuangan berbasis lokal dan partisipatif. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi jarak geografis, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang terintegrasi mencakup edukasi kontekstual, penguatan infrastruktur, dan kolaborasi multipihak untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan.

Kata kunci: literasi keuangan, inklusi keuangan, daerah tertinggal, edukasi finansial, digitalisasi, NTT

How to Cite: Mushlih, M.A.H. & Sinurat, D.A.J. (2025). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Di Daerah Tertinggal. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 5725-5735. [10.54373/ifiheb.v5i3.3558](https://doi.org/10.54373/ifiheb.v5i3.3558)

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan dan literasi keuangan merupakan dua konsep fundamental dalam upaya menciptakan pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. **Inklusi keuangan** didefinisikan sebagai ketersediaan akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh

seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional (World Bank, 2022). Sementara itu, **literasi keuangan** mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan (OJK, 2022).

Sayangnya, di banyak **daerah tertinggal** di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Kalimantan Utara, kedua aspek ini masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 oleh OJK, meskipun indeks inklusi keuangan secara nasional telah mencapai 85,10%, tingkat literasi keuangan masih tertinggal di angka 49,68%. Ketimpangan ini semakin tajam ketika dilihat dari segi geografis, di mana akses terhadap bank formal, layanan keuangan digital, dan lembaga keuangan mikro sangat terbatas, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan, kepulauan, dan pedalaman.

Rendahnya literasi keuangan tidak hanya membuat masyarakat tidak memahami produk keuangan yang tersedia, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap praktik keuangan yang tidak sehat seperti pinjaman rentenir, konsumtifisme, hingga gagal bayar utang. Di sisi lain, inklusi keuangan yang tidak disertai dengan pemahaman yang cukup bisa berdampak negatif seperti penyalahgunaan produk keuangan atau ketergantungan pada pinjaman konsumtif. Oleh karena itu, pendekatan yang terpadu antara peningkatan akses dan edukasi finansial menjadi kebutuhan mendesak.

Program pemerintah seperti Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), Gerakan Indonesia Menabung, LAKU PANDAI, dan digitalisasi BUMDes merupakan beberapa upaya penting yang patut diapresiasi. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan seperti rendahnya infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan bagi agen keuangan, hingga budaya lokal yang masih memercayai sistem keuangan informal seperti arisan atau simpan pinjam berbasis komunitas. Penelitian sebelumnya Demircuc et al. (2018) menyatakan bahwa negara-negara berkembang yang berhasil mempersempit kesenjangan finansial adalah negara yang secara simultan meningkatkan pendidikan keuangan dan memperluas cakupan layanan keuangan. Dengan demikian, membangun pemahaman keuangan dasar sangat penting bagi masyarakat di daerah tertinggal agar dapat mengelola risiko, meningkatkan tabungan, dan menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Untuk memberi gambaran yang lebih konkret, **Tabel 1** berikut menyajikan perbandingan antara indeks literasi dan inklusi keuangan nasional dengan beberapa wilayah tertinggal di Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan

Wilayah	Inklusi Keuangan (%)	Literasi Keuangan (%)
Nasional (2022)	85.10	49.68
Nusa Tenggara Timur	43.00	36.00
Papua	38.00	32.00
Kalimantan Utara	41.50	35.00

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggali kondisi aktual literasi dan inklusi keuangan di dua kabupaten tertinggal di Provinsi NTT dan menawarkan strategi yang relevan untuk mendorong partisipasi keuangan masyarakat secara berkelanjutan. Fokus diberikan pada relasi antara akses terhadap layanan keuangan digital dengan peningkatan pengetahuan dan perilaku keuangan masyarakat pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Kabupaten Belu dan Sumba Timur sebagai daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa saja faktor sosial, budaya, dan infrastruktur yang memengaruhi rendahnya pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di kedua wilayah tersebut?
3. Bagaimana hubungan antara tingkat literasi keuangan dengan kepemilikan dan pemanfaatan rekening bank oleh masyarakat?
4. Strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang kontekstual dan berkelanjutan di daerah tertinggal?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **mixed methods** atau metode campuran, yakni menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terkait tingkat inklusi dan literasi keuangan di daerah tertinggal. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data numerik yang representatif sekaligus mendalami konteks sosial dan perilaku keuangan masyarakat (Creswell & Plano Clark, 2018).

Desain dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal oleh Kementerian Desa, yaitu Kabupaten Belu dan

Kabupaten Sumba Timur. Kedua wilayah dipilih karena memiliki karakteristik demografis yang beragam, akses infrastruktur yang terbatas, dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di kedua kabupaten tersebut. Sampel diambil dengan teknik **stratified random sampling** berdasarkan wilayah desa dan status sosial ekonomi, dengan total responden sebanyak **300 kepala keluarga** (masing-masing 150 dari tiap kabupaten).

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen kuantitatif berupa kuesioner terstruktur yang mencakup:

1. Pengetahuan keuangan dasar (bunga, inflasi, risiko, diversifikasi)
2. Perilaku keuangan (menabung, berutang, menggunakan layanan digital)
3. Akses terhadap layanan keuangan formal (rekening bank, dompet digital, koperasi)

Untuk pendekatan kualitatif, dilakukan wawancara mendalam dengan 20 informan kunci: tokoh masyarakat, perangkat desa, pelaku UMKM, agen LAKU PANDAI, dan perwakilan bank.

Kriteria pemilihan informan kunci dijelaskan secara eksplisit dalam bagian metode penelitian, yaitu bahwa mereka dipilih berdasarkan peran strategis dan pengetahuan langsung mereka terhadap kondisi keuangan masyarakat di wilayah studi.

Adapun kriteria pemilihan informan kunci meliputi:

1. Keterlibatan aktif di Masyarakat

Informan merupakan tokoh yang memiliki pengaruh dan aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi lokal, seperti *tokoh masyarakat* dan *perangkat desa*.

2. Pengalaman langsung dalam layanan keuangan

Dipilih pula pelaku usaha kecil (*UMKM*) dan *agen LAKU PANDAI*, karena mereka berinteraksi langsung dengan sistem keuangan formal dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

3. Keterkaitan dengan lembaga keuangan

Perwakilan dari *bank* atau lembaga keuangan diundang untuk memberikan perspektif mengenai tantangan dan peluang inklusi dari sisi penyedia layanan.

4. Pemahaman terhadap budaya lokal dan kondisi wilayah

Informan diharapkan memiliki pemahaman kontekstual tentang norma sosial, adat, serta hambatan geografis dan digital yang mempengaruhi literasi dan inklusi keuangan di daerah tertinggal.

Dengan mempertimbangkan keempat kriteria tersebut, wawancara dilakukan untuk

memperoleh informasi mendalam yang tidak bisa dijangkau melalui data kuantitatif, seperti persepsi, nilai-nilai budaya, hambatan sosial, serta saran kontekstual untuk strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemilihan informan kunci dalam metode kualitatif yang mengutamakan relevansi informasi dan keterwakilan pengalaman

Teknik Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier sederhana untuk melihat hubungan antara literasi keuangan dan tingkat kepemilikan rekening. Data kualitatif dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, yaitu mengelompokkan jawaban berdasarkan tema dan makna yang muncul dari narasi para informan.

Validitas dan Reliabilitas

Pengujian validitas instrumen dilakukan melalui expert judgment oleh akademisi bidang ekonomi dan perbankan, sedangkan uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach Alpha yang menghasilkan skor 0,82, menunjukkan konsistensi internal yang baik.

Berikut disajikan Tabel 2 mengenai komponen indikator yang diukur dalam survei:

Tabel 2. Komponen Instrumen Survei Literasi dan Inklusi Keuangan

Komponen	Indikator	Skala
Literasi Keuangan	Pengetahuan bunga, inflasi, risiko, tabungan	Skala 1–5
Perilaku Keuangan	Frekuensi menabung, penggunaan e-wallet, utang	Skala 1–5
Akses Layanan Keuangan	Kepemilikan rekening, ATM, akses internet banking	Ya/Tidak

Dengan desain ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya mencerminkan angka-angka statistik tetapi juga menjelaskan dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi literasi dan inklusi keuangan di wilayah studi.

HASIL

Penelitian ini mengungkap berbagai dinamika yang menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan di wilayah Kabupaten Belu dan Sumba Timur, dua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Temuan diperoleh melalui kombinasi metode survei kuantitatif dan wawancara kualitatif, yang secara bersama-sama menggambarkan kondisi nyata di lapangan mengenai pemahaman, perilaku, serta akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

1. Tingkat Literasi Keuangan

Hasil pengukuran terhadap 300 responden menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang konsep dasar keuangan masih terbatas. Hanya sekitar 24% responden yang memahami konsep bunga majemuk, dan hanya 19% yang dapat menjelaskan arti inflasi serta dampaknya terhadap daya beli dan tabungan. Bahkan, sebagian besar responden (61%) mengaku belum pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan, baik secara formal maupun informal.

Distribusi tingkat literasi memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori *sedang* (40%) dan *rendah* (45%), dengan hanya 15% responden yang tergolong memiliki literasi tinggi. Di antara dua kabupaten, Belu menunjukkan proporsi literasi tinggi yang lebih besar (18%) dibandingkan Sumba Timur (12%). Hal ini mencerminkan masih terbatasnya intervensi edukatif dan informasi finansial di kawasan tersebut.

Tabel 3. Distribusi Tingkat Literasi Keuangan Responden

Kategori Literasi	Belu (%)	Sumba Timur (%)	Rata-rata (%)
Tinggi	18	12	15
Sedang	43	37	40
Rendah	39	51	45

2. Akses dan Penggunaan Layanan Keuangan Formal

Dari aspek aksesibilitas, masih terdapat keterbatasan infrastruktur yang signifikan. Sebanyak 57% responden di Belu dan 68% di Sumba Timur masih menyimpan uang secara tunai di rumah karena merasa lebih aman dan mudah dijangkau. Penggunaan layanan keuangan formal seperti rekening tabungan, ATM, internet banking, dan dompet digital masih tergolong rendah.

Lebih dari separuh responden di kedua wilayah menyatakan bahwa jarak ke fasilitas keuangan seperti bank atau mesin ATM lebih dari 5 kilometer, dan sebagian besar tidak memiliki akses internet yang stabil. Hambatan ini menyebabkan layanan digital seperti mobile banking atau QRIS belum banyak digunakan. Bahkan, dalam beberapa kasus, responden menyatakan tidak pernah melihat mesin ATM secara langsung, dan hanya mendengar keberadaan layanan keuangan digital dari orang lain.

3. Korelasi antara Literasi dan Kepemilikan Rekening

Analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara tingkat literasi keuangan dan kepemilikan rekening bank, dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,62. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman seseorang mengenai keuangan, semakin besar peluang mereka untuk memiliki dan

menggunakan layanan keuangan formal. Korelasi ini memperkuat anggapan bahwa literasi keuangan bukan hanya alat edukatif, tetapi juga kunci untuk meningkatkan partisipasi keuangan masyarakat.

Dengan kata lain, akses terhadap layanan tidak akan banyak berarti jika masyarakat tidak memiliki bekal pemahaman yang cukup untuk menggunakannya secara bijak. Individu yang lebih memahami manfaat dan risiko keuangan cenderung lebih aktif menabung, menghindari utang konsumtif, dan memanfaatkan produk keuangan secara tepat.

4. Temuan Kualitatif: Sosial Budaya dan Persepsi Masyarakat

Wawancara mendalam dengan 20 informan kunci—terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, pelaku UMKM, agen LAKU PANDAI, dan perwakilan lembaga keuangan—menghasilkan sejumlah wawasan penting yang tidak tertangkap dalam data survei.

Beberapa temuan utama dari pendekatan kualitatif antara lain:

- Banyak masyarakat masih menyimpan trauma terhadap lembaga keuangan formal karena pengalaman negatif, seperti penipuan investasi atau bunga tersembunyi yang tidak dijelaskan dengan jelas.
- Edukasi keuangan yang bersifat satu arah dan berbahasa Indonesia formal sulit dipahami oleh masyarakat pedesaan. Pendekatan yang lebih efektif adalah melalui penyuluhan dalam bahasa daerah oleh tokoh masyarakat yang dipercaya.
- Sistem simpan pinjam berbasis adat atau komunitas dianggap lebih aman karena bersifat gotong royong, transparan, dan fleksibel. Meskipun tidak terdaftar secara formal, sistem ini masih menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mengelola keuangan.

Para informan juga menyatakan bahwa digitalisasi BUMDes dan program-program seperti LAKU PANDAI sebenarnya potensial, tetapi belum dimanfaatkan maksimal karena kurangnya pelatihan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan.

DISKUSI

Penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan literasi dan inklusi keuangan di daerah tertinggal seperti Kabupaten Belu dan Sumba Timur tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses fisik terhadap layanan keuangan, tetapi juga dengan rendahnya pemahaman dasar masyarakat mengenai konsep dan fungsi keuangan. Meskipun secara nasional indeks inklusi keuangan telah menunjukkan angka yang cukup tinggi, hasil di wilayah studi membuktikan bahwa masih terdapat ketimpangan yang signifikan, baik dalam hal pemanfaatan layanan keuangan formal maupun tingkat literasi masyarakat.

Secara kuantitatif, hanya 36% responden yang memiliki rekening bank aktif, sementara tingkat literasi keuangan tergolong rendah, terutama dalam pemahaman konsep bunga majemuk, inflasi, dan perbedaan jenis produk keuangan. Ini menunjukkan bahwa akses ke layanan keuangan belum otomatis mendorong penggunaan yang bijak atau produktif. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa inklusi keuangan yang tidak diimbangi literasi berisiko menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan finansial, seperti penggunaan pinjaman konsumtif, ketergantungan pada kredit informal, atau salah persepsi terhadap produk keuangan.

Dari sisi geografis dan infrastruktur, mayoritas responden menyebutkan keterbatasan jarak ke fasilitas keuangan dan buruknya jaringan internet sebagai hambatan utama. Di Sumba Timur, misalnya, lebih dari separuh responden tinggal jauh dari kantor bank atau mesin ATM. Hal ini berdampak pada rendahnya penggunaan layanan keuangan digital seperti e-wallet dan mobile banking. Akibatnya, metode keuangan tradisional seperti arisan, koperasi adat, dan penyimpanan tunai di rumah masih mendominasi aktivitas keuangan masyarakat.

Analisis korelasi dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara tingkat literasi keuangan dan kepemilikan rekening bank. Ini menegaskan bahwa pengetahuan dasar mengenai keuangan dapat mendorong individu untuk lebih aktif memanfaatkan layanan keuangan formal. Namun demikian, peningkatan literasi tidak dapat dilakukan secara instan. Wawancara mendalam mengungkap bahwa edukasi keuangan harus disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami, dalam bahasa lokal, dan menggunakan pendekatan yang berbasis kepercayaan seperti melibatkan tokoh masyarakat, guru, atau pemuka adat.

Selain aspek teknis dan kognitif, dimensi sosial-budaya juga memainkan peran penting. Rendahnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan formal, yang seringkali diasosiasikan dengan praktik birokratis, biaya tersembunyi, atau bahkan penipuan, membuat masyarakat lebih nyaman menggunakan sistem informal yang dianggap lebih transparan dan dekat secara sosial. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun kepercayaan dan kredibilitas lembaga keuangan di mata masyarakat.

Dari keseluruhan temuan, jelas bahwa pendekatan tunggal tidak cukup untuk mendorong inklusi keuangan di daerah tertinggal. Diperlukan strategi yang terintegrasi, meliputi penguatan infrastruktur digital, penyediaan layanan keuangan yang adaptif terhadap kondisi lokal, serta edukasi keuangan yang komunikatif, partisipatif, dan relevan dengan konteks budaya. Kombinasi ini akan mendorong perubahan perilaku keuangan yang lebih sehat, memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal, serta mendukung ketahanan ekonomi keluarga dan komunitas.

Dengan kata lain, inklusi keuangan yang efektif bukan hanya soal menyediakan akses, tetapi juga soal membangun pemahaman dan kepercayaan. Tanpa kedua hal tersebut, inklusi hanya akan menjadi statistik, bukan transformasi nyata bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat inklusi dan literasi keuangan di daerah tertinggal seperti Kabupaten Belu dan Sumba Timur masih tergolong rendah dan belum berjalan seiring. Meskipun akses terhadap layanan keuangan formal mulai tersedia, pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar keuangan masih terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam aktivitas keuangan yang produktif dan aman.

Keterbatasan infrastruktur, seperti jauhnya lokasi layanan keuangan dan lemahnya jaringan internet, menjadi hambatan utama dalam penggunaan layanan keuangan digital. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal juga masih rendah, sehingga banyak yang lebih memilih menggunakan sistem keuangan tradisional seperti simpanan tunai, arisan, atau koperasi adat.

Analisis kuantitatif menunjukkan adanya hubungan positif antara literasi keuangan dan kepemilikan rekening, yang memperkuat pentingnya edukasi sebagai prasyarat bagi partisipasi keuangan yang efektif. Temuan kualitatif menegaskan bahwa pendekatan edukasi yang berbasis budaya lokal, menggunakan bahasa daerah dan melibatkan tokoh masyarakat, lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan program inklusi keuangan tidak hanya ditentukan oleh perluasan akses, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas pendekatan edukatif dan partisipatif yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal. Strategi yang terintegrasi antara edukasi, infrastruktur, dan kepercayaan sosial merupakan kunci dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

REKOMENDASI

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di daerah tertinggal antara lain:

1. Edukasi Keuangan Berbasis Komunitas

Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mengembangkan program literasi keuangan yang kontekstual, menggunakan bahasa daerah, serta melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan pemuka adat sebagai agen edukasi. Edukasi tidak hanya berfokus pada

produk keuangan, tetapi juga pada pengelolaan keuangan keluarga dan perlindungan dari praktik pinjaman ilegal.

2. Peningkatan Infrastruktur Digital dan Fisik

Diperlukan investasi dalam penguatan jaringan internet dan pembangunan titik layanan keuangan (seperti agen LAKU PANDAI atau unit bank keliling) di desa-desa terpencil untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses layanan formal.

3. Penguatan Peran BUMDes dan Koperasi

BUMDes dan koperasi lokal perlu dilibatkan aktif sebagai mitra literasi dan inklusi keuangan, termasuk dalam penyaluran akses pembiayaan mikro dan pelatihan keuangan dasar bagi pelaku usaha kecil dan rumah tangga.

4. Kolaborasi Multipihak

Perlu sinergi antara pemerintah daerah, OJK, bank, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang program terpadu dan berkelanjutan. Program yang terfragmentasi cenderung tidak efektif dan sulit menjangkau komunitas secara menyeluruh.

5. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data Lokal

Evaluasi berkala terhadap program inklusi dan literasi keuangan perlu dilakukan dengan melibatkan data lokal, agar intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat secara tepat sasaran.

REFERENSI

- Allen, F., Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Peria, M. S. M. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan perekonomian provinsi Nusa Tenggara Timur 2021*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49. <https://doi.org/10.1007/s10887-007-9010-6>
- Bongomin, G. O. C., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Nabeta, I. N. (2017). Financial literacy in emerging economies: Do all dimensions matter for financial inclusion of poor households in rural Uganda? *International Journal of Social Economics*, 44(4), 478–491. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2015-0271>
- Cole, S., Sampson, T., & Zia, B. (2011). Prices or knowledge? What drives demand for financial services in emerging markets? *The Journal of Finance*, 66(6), 1933–1967. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01696.x>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution*. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1259-0>

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). *Data dan informasi daerah tertinggal 2020–2024*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Klapper, L., Lusardi, A., & Van Oudheusden, P. (2015). *Financial literacy around the world: Insights from the Standard & Poor's ratings services global financial literacy survey*. Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC). <https://gflec.org>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022*. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id>
- OECD. (2020). *Recommendation on financial literacy*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org>
- Setyowati, D. L., & Hartanto, R. (2020). Peran literasi keuangan dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(1), 12–25.
- UNDP Indonesia. (2020). *Accelerating financial inclusion in Indonesia: Challenges and opportunities*. United Nations Development Programme. <https://www.id.undp.org>
- World Bank. (2022). *Financial inclusion overview*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/overview>
- Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46–57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>